

Lampiran 3a Rencana Strategis 2010-2014

Indikator Kinerja Per Program Per Propinsi Regional – Kementerian Kehutanan

Program

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan
Pemantapan Kawasan Hutan

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL I SUMATERA**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional	Satuan	Regional I										
	Indikator Kinerja Utama		Region al I	NAD	Sum ut	Sum bar	Riau	Jambi	Sum sel	Beng kulu	Lam pung	Babel	Kepri
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN Program : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kegiatan :													
1. Pengukuhan Kawasan Hutan	• Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan	Km	8.000	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	750	1.000	300	200
	• Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%).	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	• Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%.	%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	• Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%.	%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	• Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%	%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
2. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	• Penetapan wilayah KPHP di 28 provinsi	Propinsi	8	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
	• Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia. *) Wilayah KPHK tidak dipisahkan berdasarkan administrasi pemerintahan provinsi	Propinsi	18	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
	• Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 propinsi.	Propinsi	8	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1
	• Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH)	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional	Satuan	Regional I										
	Indikator Kinerja Utama		Region al I	NAD	Sum ut	Sum bar	Riau	Jambi	Sum sel	Beng kulu	Lam pung	Babel	Kepri
	sebanyak 4 judul.												
	• Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, RE, HKm, HTR, Hutan Desa) selesai 90%.	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
3 Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan	• Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia (33 propinsi)	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	• Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengndalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul.	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	• Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul.	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	• Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari permohonan	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	• Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%;	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	• Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional	Satuan	Regional I										
	Indikator Kinerja Utama		Region al I	NAD	Sum ut	Sum bar	Riau	Jambi	Sum sel	Beng kulu	Lam pung	Babel	Kepri
	• Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	• Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun)	Satker / tahun	15	1	3	1	1	1	2	1	1	2	2
	• Data pengelolaan dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 1.300 orang	Orang	199	-	80	-	-	-	79	-	-	14	26
	• Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun)	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PUSAT DAN PER PROPINSI REGIONAL II JAWA-BALI-NTB-NTT**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional	Satuan	Pusat dan Regional II										
	Indikator Kinerja Utama		Pusat	Regional II	DKI	Ban ten	Jabar	Ja teng	Jatim	DIY	Bali	NTB	NTT
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN Program : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kegiatan :													
1. Pengukuhan Kawasan Hutan	• Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan	Km	-	2.000	-	-	-	-	-	-	500	1.250	1.250
	• Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%).	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	• Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%.	%	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	• Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%.	%	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	• Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%	%	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
2. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	• Penetapan wilayah KPHP di 28 provinsi	Propinsi	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	• Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia. *) KPHK tidak dipisahkan berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan	Propinsi	67	20	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)